



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**

laporan kinerja tahun 2022

UUD 1945 Pasal 28 F

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".



@komisiinformasijawabarat

@komisiinformasijawabarat

komisiinformasijawabarat

<https://komisiinformasi.jabarprov.go.id>

DAFTAR ISI |

- 3 Kata Pengantar
- 4 Tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- 6 Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- 7 Visi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- 7 Misi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

A. BIDANG KELEMBAGAAN

- 8 Penguatan Kelembagaan
- 14 Peningkatan Kapasitas SDM Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- 15 Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Lain dengan Menjadi Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- 18 Kerjasama dengan Lembaga Lain
- 19 Pencapaian Target Bidang Kelembagaan

B. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI (PSI)

- 19 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
- 25 Penyelesaian Sengketa Informasi
- 28 Keberatan Terhadap Putusan Komisi Informasi
- 29 Pencapaian Target Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

B. BIDANG ASISTENSI PPID

- 33 Kegiatan Asistensi Penerapan Keterbukaan Informasi
- 35 Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik
- 37 Pencapaian Target Bidang Asistensi dan PPID

D. BIDANG ADVOKASI, SOSIALISASI, DAN EDUKASI

- 40 Kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik
- 43 Publikasi Media TV, Media Radio, Media Cetak, dan *Online*
- 46 Kegiatan Monitoring Evaluasi berbasis Elektronik (*e-MONEV*) Penerapan Keterbukaan Informasi Publik
- 55 Kegiatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)
- 59 Kegiatan Apresiasi Desa
- 60 Pencapaian Kegiatan Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi

- 61 LAMPIRAN

KATA PENGANTAR |

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 mencakup informasi yang terlayani sepanjang Tahun 2022. Data yang dihimpun dalam laporan ini merupakan dari Kegiatan Bidang Kelembagaan, Bidang Asistensi dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Kami berharap Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 ini dapat dimanfaatkan dalam mendorong peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat ini. Terima kasih.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Ijang Faisal

Tentang

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, dan kepastian informasi di masyarakat. Keterbukaan informasi memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini dapat mendorong terciptanya *good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Komisi Informasi dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP), Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Untuk menjalankan fungsi dari Komisi Informasi, Undang-undang Keterbukaan Informasi memandatkan tugas yang dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU KIP sebagai berikut;

Komisi Informasi bertugas:

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini;*
- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan*
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.*

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat membentuk Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 April 2011 melalui Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.566-Diskominfo/2011 tentang Pengangkatan Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2019 - 2023 dikukuhkan langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, tanggal 31 Desember 2019 bertempat di Aula Timur Gedung Sate. Di tempat dan tanggal yang sama, dilakukan pula agenda serah terima jabatan dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2015 - 2019 kepada Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2023.

Komisioner

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



- **Ijang Faisal**
Ketua Komisi Informasi
- **Dedi Dharmawan**
Wakil Ketua Komisi Informasi merangkap Komisioner Bidang Kelembagaan
- **Husni Farhani Mubarak**
Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
- **Yudaningsih**
Komisioner Bidang PPID
- **Dadan Saputra**
Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE)

Visi

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Maju, Partisipatif, dan Berkepribadian Melalui Komisi Informasi Jawa Barat yang Mandiri dan Berkeadilan Menuju Jawa Barat Juara Lahir dan Batin”

Misi

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

- Meningkatkan Kesadaran Kritis Masyarakat Jawa Barat agar mampu mengakses dan pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan informasi menggunakan informasi secara bertanggungjawab serta aktif berpartisipasi dalam proses
- Memperkuat Kelembagaan Komisi Informasi Jawa Barat melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan
- Mengoptimalkan Kualitas Kebijakan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana
- Membangun Kemitraan dengan *stakeholders* demi mengakselerasi masyarakat informasi Menuju Jawa Barat Juara Lahir dan Batin
- Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik

Bidang Kelembagaan

Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memiliki tugas menyusun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan serta melakukan koordinasi penguatan kelembagaan, kegiatan kerjasama dengan Komisi Informasi kabupaten/kota, dan Badan Publik se-Jawa Barat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi Komisioner maupun Asisten di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan sistem dukungan terhadap pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.



Foto. Audiensi terkait Rakernis bersama Bapak Gubernur Jawa Barat

- **Penguatan Kelembagaan**

Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam keterbukaan informasi di Indonesia yang signifikan sebagai lembaga yang mengawal Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan menjamin hak akses informasi masyarakat Provinsi Jawa Barat harus dilakukan penguatan dengan Badan Publik di Provinsi Jawa Barat. Manfaat yang didapatkan dari Penguatan Kelembagaan ini adalah terbentuk dan tersusunnya tugas, fungsi, dan susunan

organisasi yang mencerminkan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan penyusunan rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi unit kerja.

Penguatan kelembagaan di tahun 2022 ini, diawali dengan Kunjungan ke Komisi Informasi Kota Cirebon dengan pembahasan Program Kegiatan Komisi Informasi Pusat, terkait Kegiatan Pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Kunjungan seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.
Kunjungan Bidang kelembagaan ke Badan Publik

No	Tanggal	Kunjungan Kelembagaan	Maksud dan Tujuan
1	18 Februari 2022	Komisi Informasi & Diskominfo Kota Cirebon	Konsultasi perihal Tupoksi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	21 Februari 2022	Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau	Kunjungan Kelembagaan
3	10 Maret 2022	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon	Koordinasi terkait Program Kerja dan Anggaran Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
4	25 Maret 2022	Pemerintah Kota Bekasi	Konsultasi perihal Tupoksi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
5	31 Maret 2022	Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya	Konsultasi perihal Tupoksi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
6	1 April 2022	Badan Penghubung Provinsi Jabar	Koordinasi perihal Tupoksi dan Pembangunan antar Lembaga
7	19 April 2022	Komisi Informasi Pusat	Koordinasi terkait Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Informasi

8	31 Mei 2022	Koordinasi terkait kegiatan literasi di Kabupaten Purwakarta	Koordinasi terkait kegiatan literasi di Kabupaten Purwakarta
9	31 Mei 2022	Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan
10	23 Juni 2022	Diskominfo Kabupaten Bogor	Konsultasi perihal Tupoksi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
11	28 Juni 2022	Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat	Koordinasi perihal Tupoksi dan Pembangunan antar Lembaga
12	29 Juni 2022	Komisi Informasi Pusat	Koordinasi terkait Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2022
13	19 Juli 2022	Komisi Informasi Pusat (hal: Rakernis)	Koordinasi terkait Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Tahun 2022
14	9 Agustus 2022	Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung	Koordinasi terkait tupoksi dan pembahasan Persidangan di Komisi Informasi Jawa Barat
15	18 Agustus 2022	Diskominfo Kabupaten Garut	Konsultasi perihal Tupoksi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
16	25 Agustus 2022	Diskominfo dan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon	Konsultasi perihal Tupoksi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
17	30 September 2022	Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat di DKI Jakarta	Kunjungan Kelembagaan dan Koordinasi
18	6 Oktober 2022	Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (MONEV) berbasis Elektronik
19	17 Oktober 2022	Diskominfo Provinsi Jawa Barat	Koordinasi terkait persiapan Visitasi MONEV Kabupaten Kota

20	26 November 2022	BPBD Kabupaten Cianjur	Kunjungan Kelembagaan dan Penyerahan Bantuan Penanganan Bencana
21	7 Desember 2022	Diskominfo Kota Tasikmalaya	Kunjungan Kelembagaan dan Koordinasi Keterbukaan Informasi
22	14 Desember 2022	Komisi Informasi Pusat	Menghadiri Undangan Penganugerahan
23	15 Desember 2022	Komisi Informasi Kalimantan Timur	Kunjungan Kelembagaan dan Menghadiri Penganugerahan
24	21 Desember 2022	KID Kota Cirebon	Kunjungan Kelembagaan dan Koordinasi
25	22 Desember 2022	Kantor Gubernur Jawa Barat	Audiensi Komisi Informasi Prov. Jabar

Tahun 2022, Komisi Informasi juga menerima kunjungan kelembagaan dari Badan Publik di Dalam dan Luar Provinsi Jawa Barat seperti yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.
Kunjungan Kelembagaan ke Komisi Informasi

No	Tanggal	Kunjungan Kelembagaan	Maksud dan Tujuan
1	5 Januari 2022	Diskominfo Provinsi Jawa Barat	Konsultasi perihal Tupoksi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	7 Januari 2022	Komisi Informasi Pusat	Kunjungan Konsultasi terkait Kegiatan Kelembagaan Tahun 2022
3	17 Maret 2022	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat & Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah	Konsultasi perihal Tupoksi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

4	21 Maret 2022	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) & Komisi Informasi Provinsi Banten	Kunjungan Kelembagaan terkait Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat
5	19 Mei 2022	Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	Kunjungan konsultasi PPID dan Bagian Hukum Pemda Garut terkait Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan
6	8 Juni 2022	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara	Kunjungan Kelembagaan terkait Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat
7	21 Juni 2022	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat	Kunjungan terkait penyiapan berkas kelembagaan
8	26 Juli 2022	Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat	Koordinasi terkait Kepegawaian dan Anggaran Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
9	1 Agustus 2022	Komisi Informasi Pusat	Kunjungan Konsultasi terkait Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
10	1 September 2022	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	Kunjungan Kelembagaan terkait Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat
11	23 September 2022	Kunjungan dari Ombudsman RI Pusat	Koordinasi terkait Program Kerja dan Anggaran Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Tahun 2022 ini, Komisi Informasi melaksanakan kegiatan penting dalam mengakomodir serta meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan. Salah satunya, untuk pertama kalinya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendapatkan kepercayaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai tuan rumah dalam

pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Komisi Informasi se-Indonesia yang dilaksanakan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.
Kegiatan Kelembagaan

No	Tanggal	Kegiatan	Peserta
1	5 - 7 September 2022	Rakernis ke-11 Komisi informasi se-Indonesia 2022 di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	Komisi Informasi se-Indonesia
2	19 - 20 September 2022	Rapat Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rakernis 2022 di Kabupaten Subang	Seluruh jajaran Komisi Informasi Jabar
3	12-14 Oktober 2022	RAKORNAS Komisi Informasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Komisi Informasi se-Indonesia
4	6 Desember 2022	Hari Disabilitas Internasional "Akses Informasi Publik tanpa keterbatasan" bersama KI Pusat di UNPAD	Komisi Informasi Pusat dan Jawa Barat
5	26-28 Desember 2022	Rapat Evaluasi Akhir Tahun dan Proyeksi Program Tahun 2023	Seluruh jajaran Komisi Informasi Jabar

- **Peningkatan Kapasitas SDM Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat**

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan peningkatan kapasitas terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) baik Komisioner maupun Asisten di Lembaga Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Bimbingan Teknis Komisi Informasi pada tahun ini masih tetap fokus kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi agar administasi terkait Penyelesaian Sengketa Informasi dapat lebih diperketat lagi, mengingat Permohonan Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022

ini sebanyak 202 permohonan. Jika dibandingkan permohonan tahun ini lebih banyak dibandingkan Tahun 2021 yang hanya 88 permohonan informasi.

Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas yang telah dilakukan oleh SDM di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 4.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas

No	Tanggal	Peningkatan Kapasitas	Peserta
1	1 – 3 September 2022	Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat di Bekasi	Komisioner Komisi Informasi di seluruh Indonesia
2	18 – 19 November 2022	Pelatihan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diadakan oleh <i>Kanaka Taraining</i> di Solo	Komisioner dan Asisten Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
3	18 – 19 November 2022	Pelatihan Mediator yang diadakan oleh <i>Kanaka Taraining</i> di Solo	Komisioner dan Asisten Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

- **Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga lain dengan Menjadikan Komisi Informasi sebagai Narasumber**

Selain peningkatan kapasitas yang diseleenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, kegiatan peningkatan kapasitas dilakukan terhadap SDM (Sumber Daya Manusia) pada Badan Publik dengan melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik sebagai narasumber. Para Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat menghadiri undangan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Publik atau kelompok masyarakat. Pada tahun 2022, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menjadi narasumber dan mengikuti kegiatan terkait sosialisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.
Permohonan menjadi Narasumber dari lembaga lain

No	Tanggal	Kegiatan	Peserta
1	8 Maret 2022	Menghadiri Undangan PPID Kabupaten Sumedang Sebagai Narasumber Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID pembantu dan Pejabat Penghubung Lapor dalam Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	PPID Pembantu Diskominfo Kabupaten Sumedang
2	19 April 2022	Undangan Kabupaten Bandung sebagai Narasumber Edukasi Pencegahan Korupsi dan Keterbukaan Informasi Publik	Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat
3	2 Juni 2022	Menghadiri undangan Narasumber di Kabupaten Garut dengan tema “FGD Daftar Informasi yang dikecualikan”.	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
4	3 Juni 2022	Menghadiri Undangan Narasumber terkait pembentukan Komisi Informasi Daerah di Kabupaten Pangandaran	Diskominfo Kabupaten Pangandaran
5	15 Juli 2022	Menghadiri Undangan Diskusi Publik dan Das sein, Das Sollen penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik	KPU Kota Sukabumi
6	19 Juli 2022	Menghadiri Undangan Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID “Sosialisasi Penguatan tata Kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Diskominfo Kabupaten Kuningan
7	19 Juli 2022	Menghadiri Undangan Narasumber Kesadaran pada Publik tentang pentingnya Keterbukaan Informasi Publik	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Bekasi

8	27 Juli 2022	Menghadiri Undangan menjadi saksi penandatanganan Pelantikan Majelis Daerah KAHMI dan FORHATI di Kabupaten Bandung	KAHMI dan FORHATI
9	10 Agustus 2022	Menghadiri Undangan Narasumber Peningkatan Kapasitas Pengurus JRK Jabar dalam Implementasi Keterbukaan Informasi pada Jaringan Komunitas Jabar di Kabupaten Bandung	Jaringan Radio Komunitas (JRK) Jawa Barat
10	31 Agustus 2022	Menghadiri Undangan Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID Utama/Pelaksanaan dalam melaksanakan penerapan keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	Diskominfo Kabupaten Bogor
11	2 September 2022	Menghadiri Undangan Rapat Kerja Nasional ke – 13 Komisi Informasi Pusat se Indonesia	Seluruh Komisi Informasi se-Indonesia
12	11 Oktober 2022	Menghadiri Undangan Narasumber FGD untuk menuji Badan Publik yang sementara masuk dalam kategori informatif di SETDA Kota Bekasi	Pemerintah Daerah Kota Bekasi
13	26 Oktober 2022	Anugrah Penyiaran KPID Jawa Barat ke -15 dengan tema Penyiaran Bangkit untuk Jabar Juara lahir batin di Kabupaten Bekasi	KPID Provinsi Jawa Barat
14	21 November 2022	Menghadiri Undangan Narasumber dalam rangka "Sinergi Implementasi Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pemerintah Kabupaten Bogor

15	22 November 2022	Menghadiri Undangan Narasumber dalam rangka "Peningkatan dan Peran Kapasitas SDM PPID Kota Banjar"	PPID Kota Banjar
----	------------------	--	------------------

- **Kerjasama dengan Lembaga Lain**

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terus membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak dengan melakukan kolaborasi dengan beberapa *stakeholder*, antara lain melakukan *MoU* dan koordinasi kelembagaan dengan berbagai pihak, sesuai dengan yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6.
MoU dengan Stakeholder Tahun 2022

No	MoU Kerjasama	Tema Kerjasama
1	<i>MoU</i> Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	Diteksi dini dan peringatan dalam rangka menjaga Kondusivitas Jawa Barat menjelang Pemilihan Umum 2022
2	<i>MoU</i> Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi
3	<i>MoU</i> Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Islam Nusantara (UNINUS)	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia

Tahun 2022 ini, Komisi Informasi hanya bekerjasama dengan 3 (tiga) *stakeholder*, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat penurunan yaitu, 4 (empat) *stakeholder* yang melakukan kerjasama.

- **Pencapaian Target Bidang Kelembagaan**

Bidang Kelembagaan sudah melakukan 3 (tiga) kegiatan utama pada Bidang Kelembagaan, yakni, koordinasi penguatan kelembagaan, kerjasama dengan *stakeholder*, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi Komisioner dan Asisten di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Tahun 2022 ini, Komisi Informasi sudah bersinergi dengan Komisi Informasi Provinsi lain dengan melakukan koordinasi terkait penguatan kelembagaan melalui kunjungan ke Komisi Informasi Daerah dan Provinsi lain, maupun kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi lain ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Bidang Kelembagaan juga sudah melakukan kerjasama dengan 3 (tiga) *stakeholder* dan peningkatan kapasitas terhadap Komisioner dan Asisten di Lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Adapun target yang belum tercapai secara optimal adalah dukungan pengadaan sarana dan administrasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang belum sesuai dengan target, seperti pengadaan gedung kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang ramah difabel, pengadaan database digital, peningkatan kapasitas dan kapabilitas Komisioner, Petugas Kepaniteraan, dan Asisten Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Bidang PSI

Penyelesaian Sengketa Informasi

Bidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab bidang ini adalah pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik dan peningkatan kualitas layanan penyelesaian sengketa informasi publik.



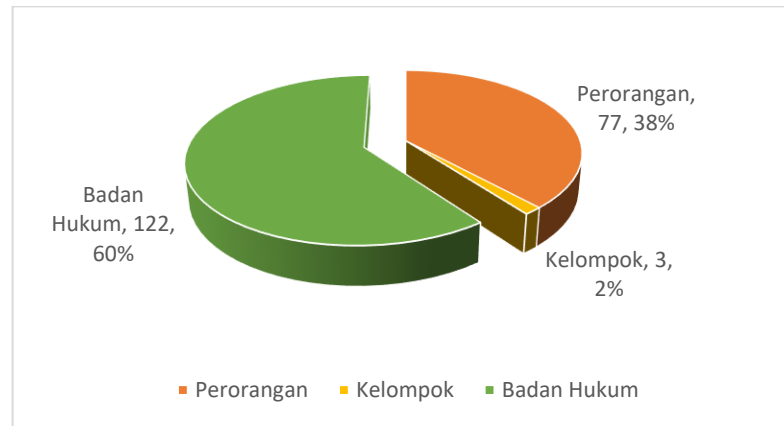
Foto. Persidangan Ajudikasi non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat diberikan kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada Badan Publik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Barat. Bidang PSI ini merupakan jantung dari Komisi Informasi, adapun Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu (1) melaksanakan asas penyelesaian sengketa informasi publik secara cepat, biaya ringan, terbuka, dan sederhana; (2) menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi non-litigasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berikut adalah Laporan Penyelesaian Sengketa Informasi pada Tahun 2022;

- **Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

Sampai bulan Desember 2022, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerima pengajuan sebanyak 202 pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Jumlah tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pengajuan pada Tahun 2021 (yaitu sebanyak 88 pengajuan). Berikut gambaran jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Jawa Barat.

Gambar 1
Data Jumlah Pemohon PSI berdasar identitas Tahun 2022



Berdasarkan data di atas, jumlah Permohonan Sengketa Informasi pada tahun 2022 didominasi oleh Badan Hukum dengan persentase 60% permohonan dengan jumlah 122 Permohonan. Permohonan yang diajukan dapat dilihat lebih pada tabel di bawah ini.

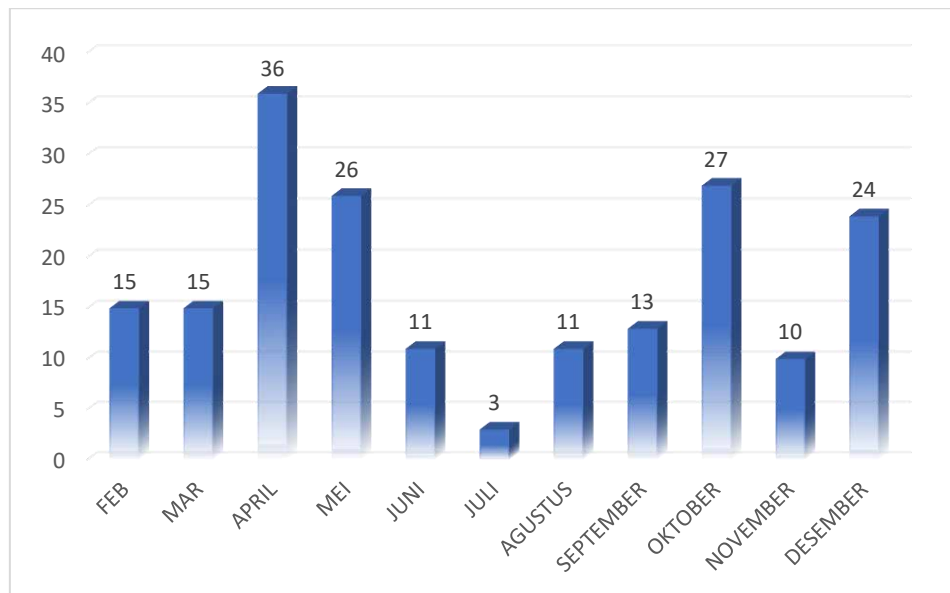
Tabel 7.
Kelompok Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi 2022

No	Identitas Pemohon	Jumlah
1	Perorangan	77
2	Kelompok/Perkumpulan	3
3	Badan Hukum	122
Jumlah		202

Dari 202 Permohonan Sengketa Informasi yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, tidak semua permohonan tersebut diregistrasi. Terdapat 38 (*tiga puluh delapan*) sengketa yang tidak dapat diregistrasi sehingga keluar **Akta Tidak Registrasi** karena Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan kelengkapan identitas setelah melalui proses pelayanan permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan.

Selain rincian identitas dari Pemohon, data Permohonan Sengketa Informasi juga dihitung berdasarkan kurun waktu seperti yang dijelaskan pada Gambar sebagai berikut.

Gambar 2
Data Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Tahun 2022



Berdasarkan Gambar di atas, terlihat bahwa Data Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan kurun waktu dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2022, jumlah permohonan paling tinggi berada pada Bulan April sebanyak 36 kasus.

Tabel 8.

Alasan Pemohon Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi
Ke Komisi Informasi Jawa Barat

No	Alasan Pengajuan	Jumlah
1	Atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam pasal 17 UU	7
2	Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 UU KIP	5
3	Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon	149
4	Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas Keberatan	44
5	Pengenaan biaya yang tidak wajar	0
6	Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam UU KIP	5
Jumlah		210

Tabel 8 menunjukkan alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Beberapa Pemohon memilih lebih dari satu alasan.

Kemudian, Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan Pemohon tidak mendapat tanggapan keberatan dari Atasan PPID Badan Publik mempunyai kecenderungan yang relatif tinggi dibandingkan dengan alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang lain. Artinya, masih banyak Badan Publik di Provinsi Jawa Barat yang masih belum memahami dan menerapkan kewajiban mereka untuk memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan Pemohon Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Adapun Badan Publik yang paling banyak diajukan sebagai Termohon dalam sengketa informasi pada tahun 2022 adalah Pemerintah Desa. Tercatat 91 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ditujukan kepada Pemerintah Desa. Adapun Badan Publik yang paling sedikit dijadikan Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi adalah Kementerian dengan jumlah pemohon yaitu 1 (satu) sengketa. Adapun jenis Badan Publik sebagai pihak Termohon diperoleh data berikut:

Tabel 9.
Badan Publik sebagai Termohon
Tahun 2022

No	Jenis Badan Publik	Jumlah
1	Badan Pemerintah	6
2	BUMD/BUMN	2
3	Kementerian	1
4	Lembaga Pemerintahan	12
5	Lembaga Pendidikan	11
6	Pemerintah Daerah	79
7	Pemerintah Desa	91
Jumlah		202

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kecenderungan Badan Publik yang menjadi Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah Pemerintah Desa dan disusul oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Adapun Badan Publik yang menjadi Termohon sebagian besar adalah Badan Publik di lingkup kabupaten/kota dengan sebaran lingkup wilayah sebagai berikut:

Tabel 10.
Ruang Lingkup Wilayah Termohon
Tahun 2022

No	Lingkup Wilayah	Jumlah
1	Kabupaten Bandung	18
2	Kabupaten Bandung Barat	5
3	Kabupaten Bekasi	31
4	Kabupaten Bogor	17
5	Kabupaten Cianjur	15
6	Kabupaten Garut	10
7	Kabupaten Indramayu	9
8	Kabupaten Karawang	34
9	Kabupaten Kuningan	3
10	Kabupaten Pangandaran	1
11	Kabupaten Purwakarta	4
12	Kabupaten Subang	1
13	Kabupaten Sumedang	1
14	Kota Bandung	9
15	Kota Bekasi	8
16	Kota Bogor	2
17	Kota Cimahi	2
18	Kota Depok	4
19	Kota Garut	1
20	Kota Tasikmalaya	1
21	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	12
22	Lembaga Vertikal	2
Jumlah		190

Data mengenai jenis Badan Publik dan sebaran lingkup wilayah setidaknya juga menunjukkan, bahwa kepentingan masyarakat mengakses informasi publik berkaitan dengan kebutuhan untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta kebijakan publik yang mempengaruhi

langsung kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Badan Publik yang berpotensi menjadi Termohon dalam sengketa informasi publik lebih banyak adalah Badan Publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang saat ini mempunyai sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

Hal itu juga bisa dicermati dalam data mengenai informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tahun 2022 berkisar pada 11 jenis kategori informasi publik seperti tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 11.
Informasi Publik yang Dimohonkan Pemohon
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

KODE	Kategori Informasi yang dimohonkan	Jumlah
A	Profil Badan Publik, Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan	29
B	Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik	120
C	Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik	10
D	Laporan Keuangan	136
F	Informasi Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak bagi Publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik	66
H	Informasi Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Badan Publik	2
I	Informasi Barang dan Jasa	62
L	Perjanjian Pihak Ketiga	12
M	Surat Pimpinan Badan Publik	1
N	Informasi Perizinan	9
O	Data perbendaharaan atau inventaris	41
Jumlah		488

Informasi publik yang paling banyak dimohonkan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tahun 2022 adalah Informasi tentang Laporan Keuangan. Tercatat ada 136 permohonan terkait hal tersebut.

- **Penyelesaian Sengketa Informasi**

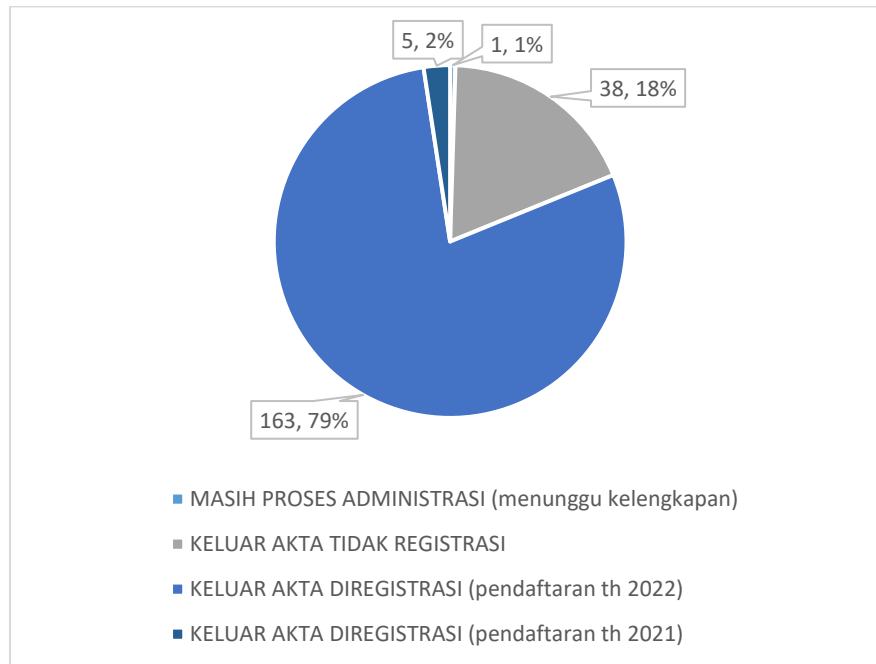
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerima dan memberikan pelayanan kepada 202 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Dari 202 Permohonan Sengketa Informasi yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut dilakukan proses identifikasi kelengkapan sesuai dengan prosedur namun kemudian tidak semua permohonan tersebut dapat lanjut untuk diselesaikan melalui persidangan/mediasi karena tidak memenuhi persyaratan untuk di registrasi sesuai pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terdapat 38 (dua puluh) sengketa yang tidak dapat diregistrasi dan keluar Akta Tidak Registrasi karena Tidak memenuhi/tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan.

Sampai saat laporan ini tersusun, terdapat 1 (satu) sengketa yang masih dalam tahap proses administrasi pemeriksaan kelengkapan dokumen karena pengajuannya yang masuk pada kisaran akhir tahun 2022 yaitu pada bulan Desember 2022. Sehingga jumlah sengketa yang sudah dapat ditetapkan statusnya dan dapat diregistrasi pada tahun 2022 ada sebanyak 168 register pengajuan sengketa. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa capaian kinerja dalam upaya melayani pengajuan sengketa informasi publik sampai dapat ditetapkan apakah pengajuan penyelesaian sengketa tersebut dapat teregister ataupun tidak dari Januari 2022 sampai bulan Desember 2022 yaitu sebanyak 102%. Lebih dari 100% karena pada awal tahun 2022 juga melakukan upaya pelayanan penetapan status pengajuan penyelesaian sengketa yang masuk di kisaran akhir tahun 2021.

Sebagaimana dapat dilihat dari Gambar 4. status pelayanan administrasi pengajuan penyelesaian sengketa sebagai berikut:

Gambar 3
 Status Pelayanan Administrasi Penerimaan Pengajuan Penyelesaian Sengketa Tahun 2022



Sepanjang tahun 2022 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan upaya penyelesaian terhadap sengketa yang sudah teregistrasi dengan melakukan total persidangan dengan berbagai agenda sidang untuk 383 Register termasuk sengketa yang belum terselesaikan di tahun 2021 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 12.
 Upaya Penyelesaian Register Sengketa Tahun 2022

No	Upaya Penyelesaian	Jumlah
1	Telah disidangkan (Minimal Agenda Pemeriksaan Awal/PA)	184
2	<i>Waiting list</i> ke agenda PA	30

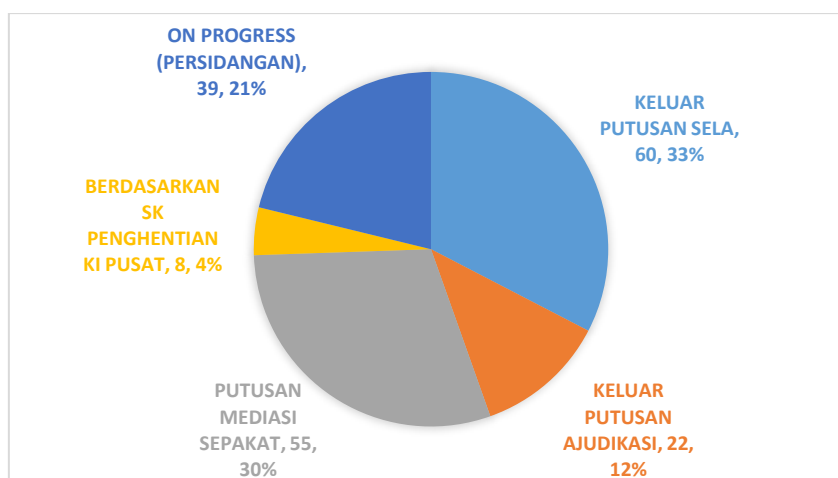
Dari upaya persidangan yang telah dilakukan, terdapat sebanyak 145 register sengketa telah diselesaikan sampai keluar putusan/penetapan, dengan hasil terbanyak adalah putusan mediasi sepakat sebanyak 55 register, sebagaimana dapat dilihat dari Status hasil Upaya Persidangan tabel berikut ini.

Tabel 13.
Status Hasil Upaya Penyelesaian Melalui Persidangan Tahun 2022

No	Hasil Persidangan	Jumlah
1	Keluar Putusan Sela	60
2	Keluar Putusan Ajudikasi	22
3	Putusan Mediasi Sepakat	55
4	Keluar Penyelesaian Berdasarkan SK KI PUSAT	8
5	<i>On Progress</i> (Persidangan)	39
Jumlah		184

Berdasarkan diagram Jenis Putusan yang diselesaikan berdasarkan register pada Tahun 2022, sebagian besar putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah putusan mediasi sepakat sebanyak 55 sengketa atau sebanyak 30%.

Gambar 4
Hasil Upaya Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Tahun 2022



Jika diakumulasi, maka dari proses penyelesaian permohonan Penyelesaian sengketa yang di register pada tahun 2022 untuk diselesaikan melalui agenda persidangan ada sebanyak 168 register. Pada Tahun 2022 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah mengupayakan penyelesaian melalui persidangan dengan melaksanakan sekurangnya tahapan agenda sidang Pemeriksaan Awal terhadap sengketa yang teregistrasi di tahun 2022 dan juga sisa tahun 2021 sebanyak 184 register, sehingga dapat dikatakan upaya penyelesaian melalui persidangan yang dilakukan pada tahun 2022 mencapai 110%.

Sementara itu, pada tahun 2022 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan putusan untuk 145 register dari 168 sengketa yang teregister tahun 2022, sehingga, pencapaian penyelesaian sengketa teregistrasi bulan Januari sampai ke bulan Desember 2022 adalah sebanyak 86%.

- **Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi**

Sesuai dengan UU KIP, maka para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui Pengadilan Tata Usaha Usaha (PTUN) Bandung atau Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung. Pada tahun 2022 sebanyak 3 (satu) putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah diajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dengan hasil yaitu terhadap dua putusan menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan terhadap satu putusan lainnya menyatakan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

- **Pencapaian Target Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Dari 202 Permohonan Sengketa Informasi yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, tidak semua permohonan tersebut diregistrasi. Terdapat 38 (*tiga puluh delapan*) sengketa yang tidak dapat diregistrasi sehingga keluar **Akta**

Tidak Registrasi karena Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan kelengkapan identitas setelah melalui proses pelayanan permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan.

Untuk itu dapat dikatakan bahwa capaian kinerja dalam upaya melayani pengajuan sengketa informasi publik sampai dapat ditetapkan apakah pengajuan penyelesaian sengketa tersebut dapat teregister ataupun tidak dari Januari 2022 sampai bulan Desember 2022 yaitu sebanyak 102%. Lebih dari 100% karena pada awal tahun 2022 juga melakukan upaya pelayanan penetapan status pengajuan penyelesaian sengketa yang masuk pada kisaran akhir tahun 2022, sementara sisanya sampai pada laporan ini dibuat yaitu sebanyak satu pengajuan sengketa masih pada tahap proses menunggu kelengkapan dari Pemohon.

Berdasarkan data penyelesaian sengketa informasi publik selama tahun 2021 dan tahun 2022, terdapat limpahan sengketa di tahun 2021 yang harus diselesaikan yaitu sebanyak 46 register, dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan seluruhnya sehingga capaian dalam menyelesaikan register (thn 2021) sampai dinyatakan selesai (keluar putusan) adalah sebanyak 100%.

Jika diakumulasi, maka dari proses penyelesaian permohonan Penyelesaian sengketa yang di register pada tahun 2022 untuk diselesaikan melalui agenda persidangan ada sebanyak 168 register. Pada Tahun 2022 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah mengupayakan penyelesaian melalui persidangan dengan melaksanakan sekurangnya tahapan agenda sidang Pemeriksaan Awal terhadap sengketa yang teregistrasi di tahun 2022 dan juga sisa tahun 2021 sebanyak 184 register, sehingga dapat dikatakan upaya penyelesaian melalui persidangan yang dilakukan pada tahun 2022 mencapai 110%.

Sementara itu, pada tahun 2022 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan putusan untuk 145 register dari 168 sengketa yang teregister tahun 2022. Sehingga, pencapaian penyelesaian sengketa teregistrasi bulan Januari sampai ke bulan Desember 2022 adalah sebanyak 86%.

Pada tahun 2022 ada 3% Putusan dari seluruh putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diajukan keberatan ke PTUN Bandung. Artinya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudah melampaui target yang membatasi jumlah putusan yang diajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha negara maksimal 25% dari seluruh putusan pada tahun berjalan.

Indikator pengajuan keberatan menjadi penting untuk menjadi salah satu faktor melihat kualitas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang telah mengacu pada peraturan perundangan secara lengkap dan mempertimbangkan keterangan dan bukti para pihak secara seksama dan objektif, sehingga putusan dapat dipahami dan diterima oleh para pihak.

Bidang Asistensi dan PPID

Bidang Asistensi dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) merupakan Bidang yang baru dibentuk di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022, setelah sebelumnya pada tahun 2021 bernama Bidang PPID saja. Asistensi dan PPID dibentuk selain untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sebagai pengelola informasi publik secara baik dan efisien, serta meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Informasi Jawa Barat sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga menyusun kebijakan program peningkatan kapasitas PPID di lingkungan Badan Publik di wilayah Provinsi Jawa Barat.



Foto. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menjadi Narasumber pada Kegiatan Workshop Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan

Pada tahun ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan dari yang sebelumnya, tertuang pada Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Jawa Barat. Saat ini PPID Komisi Informasi masih dijabat oleh tenaga sekretariat (PNS)

sedangkan Atasan PPID mengalami perubahan yang semula Wakil Ketua Komisi Informasi sekarang adalah Komisioner Bidang Asistensi dan PPID. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID dibantu para perugas layanan informasi publik dengan struktur sebagai berikut:

Penanggung jawab	: Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Ijang Faisal
Tim Pertimbangan	: Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 1. Ijang Faisal 2. Dedi Dharmawan 3. Yudaningsih 4. Husni Farhani Mubarak 5. Dadan Saputra Tenaga Ahli Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Dr. Mahi M. Hkikmat, M.Si.
Atasan PPID	: Komisioner Bidang Asistensi dan PPID Yudaningsih
PPID	: Nandi Sobandiana
Petugas Layanan Informasi Publik	: 1. Dimas Prawira 2. Desy Laelatul Komariah 3. Akoh Kosasih
Petugas Pengelola dan Penyediaan Informasi	: 1. Aang Sudrajat 2. Harris Handriawan
Petugas Fasilitasi Sengketa Informasi	: 1. Leli Leiliawati 2. Arini Yunia Pratiwi 3. Muhammad Sopian

Tugas dari PPID di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yakni merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan bidang-bidang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Fungsi dari PPID sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan informasi publik dari bidang-bidang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- b. Penyimpanan Informasi publik yang diperoleh dari bidang-bidang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- c. Pelaksanaan asistensi informasi publik yang terbuka maupun dikecualikan bagi Badan Publik di Provinsi Jawa Barat

Selain menetapkan susunan PPID, Komisi Informasi Jawa Barat juga telah menetapkan Standar Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang tertuang pada Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang meliputi:

1. SOP Pelayanan Informasi Publik;
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
3. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
4. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.

Selain itu, PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pun telah menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat dengan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

- **Kegiatan Asistensi Penerapan Keterbukaan Informasi**

Kegiatan atau program Asistensi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID di Badan Publik Jawa Barat baru dilaksanakan pada tahun ini dengan tujuan untuk melakukan pendampingan dan/atau membantu PPID/PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas PPID/PPID Pelaksana dalam melaksanakan penerapan Keterbukaan Informasi Publik. Namun, kegiatan ini masih berupa himbauan atau pemberitahuan kepada seluruh Badan Publik di Jawa Barat yang memiliki rencana melakukan kegiatan peningkatan kapasitas PPID/PPID Pelaksana di Badan Publik masing-masing.

Tabel 14.
Kegiatan Asistensi Penerapan Keterbukaan Informasi

No	Tanggal	Kegiatan	Badan Publik
1	15 Februari 2022	Asistensi PPID terkait Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat
2	22 Maret 2022	Kegiatan optimalisasi peran dan fungsi PPID pembantu dan pejabat penghubung lapor dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Undangan asistensi PPID)	Pemerintah Kabupaten Sumedang
3	23 Maret 2022	Konsultasi terkait Permohonan Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi	Bawaslu Kabupaten Karawang
4	14 April 2022	Kegiatan <i>Workshop</i> Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Hotel Savoy Homan	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
5	8 Agustus 2022	Sosialisasi terkait “Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik” kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik di Jawa Barat via <i>zoom meeting</i>	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik di Jawa Barat
6	12 September 2022	Kegiatan <i>Workshop</i> Uji Konsekuensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung	Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

- Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik, Keberatan, dan Informasi Publik yang disengketakan

Selain menangani Permohonan Sengketa Informasi, PPID Komisi Informasi pun melayani Permohonan Informasi Publik. Tahun 2022 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudah menerima 57 permohonan informasi. Terjadi peningkatan jumlah permohonan informasi jika dibandingkan dengan jumlah permohonan informasi Tahun 2021, yaitu 14 permohonan. Berikut rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik di Komisi Informasi:

Tabel 15.
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik
Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Penyelesaian		
			≤ 10 Hari	10 Hari+ 7 Hari	≥ 10 Hari
1	Januari	8	8	-	-
2	Februari	4	4	-	-
3	Maret	4	3	1	-
4	April	6	4	-	2
5	Mei	12	7	5	-
6	Juni	14	5	9	-
7	Juli	4	4	-	-
8	Agustus	1	-	1	-
9	September	3	2	1	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	1	1	-	-
Jumlah Permohonan		57			

Dari 57 Permohonan informasi Komisi Informasi sebagian besar dimohonkan oleh Perseorangan. Terdapat 56 permohonan informasi dimohon oleh perseorangan dan 1 permohonan informasi dimohon oleh Badan Hukum. Seperti yang dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 16.
Jenis Permohonan Informasi
Tahun 2022

No	Jenis Permohonan Informasi	Jumlah Pemohon	Keterangan
1	Perorangan	56	Mahasiswa, Wiraswasta, ASN, Guru, Wartawan, Buruh Harian Lepas
2	Kelompok Orang	-	-
3	Badan Hukum	1	LSM

Jika dilihat dari tabel terkait Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2022, terdapat rekapitulasi permohonan informasi yang ditanggapi. Dari 57 permohonan informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, 100 % permohonan informasi ditanggapi oleh Komisi Informasi.

Namun Pemohon Informasi berhak mengajukan Keberatan apabila terdapat alasan seperti yang dijelaskan pada Per-KI Nomor 1 Tahun 2013, sebagai berikut:

- a. penolakan atas permohonan informasi publik sesuai dengan perundang-undangan;
- b. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
- c. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- d. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
- e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan
- f. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat pengajuan Keberatan walaupun permohonan informasi sudah seluruhnya ditanggapi. Tahun 2022 ini, Komisi Informasi sudah menerima 12 (dua belas) jumlah keberatan seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 17.
Jumlah Pengajuan Keberatan Informasi
Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Keberatan
1	Januari	-
2	Februari	1
3	Maret	1
4	April	2
5	Mei	2
6	Juni	6
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-
Jumlah keberatan		12

Berdasarkan Tabel 17 di atas, Komisi Informasi menerima 12 (dua belas) jumlah keberatan. Dari 12 (dua belas) keberatan tersebut, terdapat 1 (satu) permohonan informasi yang disengketakan ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Permohonan tersebut berasal dari Pemohon LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN).

- **Pencapaian Target Bidang Asistensi dan PPID**

Pencapaian kegiatan Asistensi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik belum sepenuhnya menjangkau seluruh Badan Publik di Jawa Barat. Masih sebagian kecil Badan Publik yang memanfaatkan program/kegiatan ini dalam peningkatan kapasitas PPID/PPID Pelaksana di lingkungan Badan Publik masing-masing. Dikarenakan sebagian Badan Publik belum memiliki anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Namun, kegiatan Asistensi yang telah dilakukan kepada sebagian Badan Publik telah berhasil memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait penerapan Keterbukaan Informasi Publik yang baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian target bidang PPID (Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) pada tahun 2022 yaitu pemenuhan jumlah permohonan informasi tepat waktu, dengan waktu paling lama dalam 10 hari kerja dan pemenuhan terhadap permohonan PTUN Bandung dengan waktu paling lama 14 hari kerja sesuai dengan ketentuan di Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Pasal 13).

Target yang tercapai pada bidang PPID (Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tahun 2022 terbentuknya Struktur PPID dan ditetapkannya DIP (Daftar Informasi Publik) seperti informasi setiap saat, informasi serta merta, informasi berkala. Yang masih dalam proses adalah penetapan informasi yang dikecualikan yang hingga laporan ini dibuat masih berupa draft dan belum disahkan serta belum dilaksanakannya uji konsekuensi informasi yang dikecualikan.

Bidang ASE

Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi

Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai keterbukaan informasi publik, publikasi kepada masyarakat, dan mendorong peningkatan penerapan keterbukaan informasi oleh Badan Publik.



Foto. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Berbasis Elektronik (E-Monev) Tahun 2022

Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai keterbukaan informasi publik, publikasi kepada masyarakat, dan mendorong peningkatan penerapan keterbukaan informasi oleh Badan Publik.

Untuk itu, demi mendorong implementasi keterbukaan Informasi Publik, Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi mengupayakan tujuan tersebut dengan program-program yang telah ditetapkan kepada masyarakat agar publik mendapatkan

informasi sebagai wujud partisipasi dalam mengembangkan dan mencerdaskan lingkungannya, serta mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan diskusi reguler atau yang kini disebut dengan kegiatan “Literasi” pun menjadi salah satu upaya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam menyosialisasikan UU KIP, baik dalam konteks sosialisasi eksistensi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat beserta tugas pokok dan fungsi maupun sosialisasi lainnya terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik dalam konteks hak dan kewajiban Badan Publik dan masyarakat. Berikut uraian program kerja bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi;

- **Kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik**

Kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi bertujuan untuk mendorong semua elemen masyarakat agar dapat memahami keterbukaan informasi dan kedudukannya sebagai pemohon informasi yang diamanahkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta mendorong agar masyarakat berperan aktif untuk mengawal penerapan keterbukaan informasi publik tersebut secara luas. Tahun 2022 ini, Bidang ASE telah melaksanakan 17 (Tujuh belas) kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik di berbagai kota dan kabupaten se-Jawa Barat dengan daftar pesertanya dihadiri oleh elemen masyarakat sampai pada mahasiswa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18.
Kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

No	Tanggal	Kegiatan	Narasumber
1	17 Februari 2022	Literasi dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik dilihat dari sudut pandang Agama Islam” di PONPES YPI An-Nur Garut	<ul style="list-style-type: none"> • K.H. Deden Moh Ilyas • Mumu Musthopa • Dadan Saputra • Dedi Dharmawan
2	23 Februari 2022	Literasi dengan tema “Urgensi Partisipasi Masyarakat Akademik	<ul style="list-style-type: none"> • H. Arif Hamid Rajman

		dalam Keterbukaan Informasi Publik” di STAI Persis Kab. Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Nurdin Qusyairi, M.Ikom • Husni Farhani Mubarak • Yudaningsih
3	15 Maret 2022	Literasi dengan tema “Transparansi Mengokohkan Peradaban Negeri” di Gedung ICMI Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Hj. Neneng Athiatul Faiziah • DR. H. Aep Saepulloh • Yudaningsih
4	24 Maret 2022	Literasi dengan tema “Sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” di Resto Wulansari Kota Bekasi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Atifah • Mahi M Hkikmat • Ijang Faisal
5	28 Maret 2022	Literasi dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik dalam mendorong tata kelola lingkungan hidup yang mensejahterakan masyarakat” di Gedung Sabusu Jatinangor	<ul style="list-style-type: none"> • Dadan Ramdan • Dedi Kurniawan • Dadan Saputra
6	27 April 2022	Literasi dengan tema “Optimalisasi Partisipasi Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik” di Kantor Kecamatan Cibiru	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. H. Ah. Fathoni, M.Ag • Imam Syafe’i, M.MPd • Husni Farhani Mubarak
7	28 April 2022	Literasi dengan tema “Refleksi 12 Tahun Komisi Informasi Jawa Barat” di Menara Gedung Sate	<ul style="list-style-type: none"> • Dan Satriana • Anne Friday Safaria • Budi Yoga Permana
8	11 Mei 2022	Literasi dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Mempersiapkan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Indriawan Surya Priyatna, S.Pd., M.Pd • Dadan Saputra

		Emas 2045” di Armor Kopi Badjoeri KBB	
9	20 Mei 2022	Literasi dengan tema “Revitalisasi Keterbukaan Informasi Publik Pasca Idul Fitri” di Samalona Coffe Story	<ul style="list-style-type: none"> • H. Muhamad Sidkon, DJ, S.H • Yudaningsih
10	11 Juni 2022	Literasi dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pendidikan” di Hide and Seek Coffee Purwakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Mahi M Hikmat, M.Si. • Riesye Silvana, S.STP., MAP. • Dedi Dharmawan
11	5 Juli 2022	Literasi dengan tema “Teknik Media dalam Mencari, Mengolah dan Membuat Berita yang Benar” di Gelanggang Generasi Muda	<ul style="list-style-type: none"> • Agus Wahyudin, SE.,C.EJ.,C.BJ • Grinaldi • Mahi M. Hikmat
12	24 Agustus 2022	Literasi dengan tema “Urgensi Partisipasi Mahasiswa dalam Keterbukaan Informasi” di STKIP Muhammadiyah Bogor	<ul style="list-style-type: none"> • Lucky Lukman Nul Hakim • Yudaningsih
13	13 September 2022	Literasi dengan tema “Menata Jalan Mulus Keterbukaan Informasi Publik antara Bandung-Cimahi” di Dinas Sosial Provinsi Jabar	<ul style="list-style-type: none"> • Rafael Situmorang, SH • Dadan Saputra • Edy Silaban
14	11 November 2022	Literasi dengan tema “Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Sudut Pandang Kelompok Masyarakat Sipil” di Perkumpulan Inisiatif	<ul style="list-style-type: none"> • Elga Subangkit • Firman Budiawan • Dadan Saputra
15	14 November 2022	Literasi dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik dari Perspektif	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Jamaludin, SH, MH • Dadan Saputra

		Hukum Indonesia” di UNINUS Bandung	
16	30 November 2022	Literasi dengan tema “Eksistensi Mahasiswa dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik” di UMB	<ul style="list-style-type: none"> • Mahi M Hikmat • Dr. Dudi Sudrajat Andurachim, ST • Ahmad Rifai, M.Ag • Cucu Mustarsidin, M.Si
17	14 Desember 2022	Literasi dengan tema “Keterbukaan informasi publik di civitas akademik International women University” di IWU Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Dadan Saputra • Toteng • Aulia Asmarani

- **Publikasi Media TV, Media Radio, Media Cetak, dan Online**

Selain menyosialisasikan keterbukaan informasi melalui kegiatan literasi keterbukaan informasi publik, publikasi melalui media TV, media radio, media cetak, dan media online juga merupakan bagian dari kegiatan Bidang ASE.

Publikasi Media TV dan Radio disampaikan melalui program *talkshow*. Kegiatan *Talkshow* Keterbukaan Informasi ini dilakukan sebagai cara publikasi langsung dengan harapan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas khususnya masyarakat yang berada di daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Pada tahun 2022, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi, *Talkshow* di TV, *Talkshow* di Radio dan *Live Streaming Talkshow*, sebagai berikut :

Tabel 19.
Kegiatan *Talkshow* di Radio dan TV

No	Tanggal	Kegiatan	Media
1	17 Februari 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik di masa pandemi Covid-19”	Radio Medina Garut
2	19 Februari 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Menangkal hoax dengan memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik”	Radio Adil Yeli Kab. Cirebon
3	24 Februari 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Partisipasi Publik dan Pelayanan PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik”	LPPL eRKS Sumedang
4	9 Maret 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik untuk Mendorong Tata Kelola Desa”	Radio Pasundan Cianjur
5	23 Maret 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Keterbukaan Informasi menjadi Hak Asasi & Konstitusional”	Radio Dakta 107 FM Kota Bekasi
6	31 Maret 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Transparansi Mengokohkan Peradaban Negeri”	Radio elshifa subang
7	15 April 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Keterbukaan Informasi dan Demokrasi”	Radio RRI Pro- 1 97,6 FM
8	18 April 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Urgensi dan Partisipasi Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik”	Radio LPPL Tegar Beriman Diskominfo Kab. Bogor
9	25 April 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Urgensi dan Partisipasi Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik”	Radio Flamboyan Karawang
10	27 April 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Ramadhan dan spirit keterbukaan”	Radio LPPL Cianjur FM

11	28 April 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Keterbukaan Informasi dan Demokrasi”	Radio RRI Pro- 1 97,6 FM
12	17 Mei 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Revitalisasi Keterbukaan Informasi Menghadapi Pemilu Serentak 2024”	Radio Kandaga Kab. Bandung
13	31 Mei 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Memupuk Budaya Keterbukaan Informasi Pada Badan Publik & Masyarakat”	Radio Sonata Kota Bandung
14	4 Juni 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi Publik”	LPPL Radio Kuningan FM
15	7 Juni 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Mendorong keterbukaan informasi di badan publik”	Radio RRI Pro- 1 97,6 FM
16	10 Juni 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Mewujudkan Badan Publik Informatif antara Asa dan Fakta”	Radio Galuh 89,5 FM Tasikmalaya
17	12 Juni 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Profesionalisme dan Kemajuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi”	TV Suara Mukti Kab. Bekasi
18	24 Juni 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Keterbukaan Informasi, Pembangunan dan Demokrasi”	Urban Radio 106.3 fm Bandung
19	8 Juli 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendorong Tata Kelola Kabupaten Garut Menjadi Lebih Baik”	Radio MG Garut

20	8 Juli 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Profesionalisme dan Kemajuan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi”	Radio LPPL Swara Perintis 93.1 fm Sukabumi
21	18 Agustus 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Peran Radio dalam Mendorong Keterbukaan Tata Kelola Alam Geopark Sukabumi”	Radio PAS 89.0 FM Sukabumi
22	25 November 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Hak Korban untuk Mendapatkan Informasi Serta Merta Sebagai Bagian Dari Manajemen Tanggap Darurat Bencana”	Radio Tanggap Darurat Cianjur
23	6 Desember 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Hak Korban untuk Mendapatkan Informasi Serta Merta Sebagai Bagian Dari Manajemen Tanggap Darurat Bencana”	Radio Tanggap Darura tvia Zoom Meeting
24	20 Desember 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Hak Korban untuk Mendapatkan Informasi Serta Merta Sebagai Bagian Dari Manajemen Tanggap Darurat Bencana	Radio Tanggap Darurat Cianjur
25	27 Desember 2022	<i>Talkshow</i> dengan tema “Memupuk Budaya Keterbukaan Informasi Pada Badan Publik & Masyarakat”	Radio Intan Medina Garut

Bedasarkan tabel di atas, dapat dilihat bawa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan 1 (satu) Kegiatan *Talkshow* di Media Televisi dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan *Talkshow* di Media Radio. Kegiatan tersebut fokus kepada urgensi keterbukaan informasi publik dalam mendukung profesionalisme dan kemajuan Badan Publik.

Penyampaian informasi juga rutin dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui kerjasama dengan media massa, baik cetak maupun online. Namun Tahun ini, Komisi Informasi tidak melakukan publikasi di media cetak. Komisi

Informasi telah melakukan 90 *release* dari media online. Berikut adalah 23 Media *Online* yang menampilkan *release* Tahun 2022:

Tabel 20.
Jumlah *Release*

No	Media	Jumlah <i>Release</i>
1	Kejakimpolnews.com	21 <i>release</i>
2	TerasJabar.co	20 <i>release</i>
3	Ayoindonesia.com	12 <i>release</i>
4	TuguBandung	9 <i>release</i>
5	detiknews	4 <i>release</i>
6	Kapol.id	3 <i>release</i>
7	www.cnnindonesia.com	2 <i>release</i>
8	Media Tata Ruang	2 <i>release</i>
9	timesindonesia	2 <i>release</i>
10	RM.id	1 <i>release</i>
11	NUBandung.id	1 <i>release</i>
12	Sindonews.com	1 <i>release</i>
13	RakyatMerdeka.id	1 <i>release</i>
14	Republika.co.id	1 <i>release</i>
15	Tribunnews.com	1 <i>release</i>
16	Rakyat Aceh Online	1 <i>release</i>
17	mnctrijaya.com	1 <i>release</i>
18	Media Indonesia	1 <i>release</i>
19	mmckalteng	1 <i>release</i>
20	Tempo.com	1 <i>release</i>
21	Republika.co.id	1 <i>release</i>
22	Bandung24jam.republika.co.id	1 <i>release</i>
23	mediakompasnews	1 <i>release</i>
Jumlah		90 <i>release</i>

- **Kegiatan Monitoring Evaluasi Berbasis Elektronik (E-Monev) Penerapan Keterbukaan Informasi Publik**

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengawal penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Badan Publik Jawa Barat.

Pada Tahun 2022, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan Evaluasi penerapan UU KIP berbasis elektronik (E-Monev). E-Monev adalah suatu terobosan yang Komisi Informasi Jawa Barat berikan dalam melakukan monitoring dan Evaluasi kepada Badan Publik di Lingkungan Provinsi Jawa Barat. E-Monev dilakukan dengan cara Badan Publik mengisi kuesioner (SAQ) secara online, kemudian hasil penilaian kuesioner akan diumumkan secara terbuka melalui portal. Penerapan Monitoring dan Evaluasi berbasis Elektronik ini juga merupakan salah satu upaya untuk mendukung salah satu cita-cita Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pemerintahannya untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital.

Instrumen Monitoring dan Evaluasi terdiri dari empat Komponen Indikator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi. Namun sejak Tahun 2020, terdapat tambahan 1 (satu) komponen indikator pada pemeriksaan Monev khusus untuk Badan Publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, yaitu Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta terkait Penanganan Pandemi Covid-19. Adapun indikator penilaian Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2022 yaitu :

1. Eksistensi Kelembagaan PPID
2. Standar Pelayanan Informasi Publik

3. Ketersediaan Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala
4. Ketersediaan Informasi yang Wajib Disediakan Setiap Saat
5. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta terkait Penanganan Pandemi Covid-19

Pada tahun 2022, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diikuti oleh 78 Badan Publik yang terdiri dari 3 (tiga) jenis Badan Publik, yaitu:

1. OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat

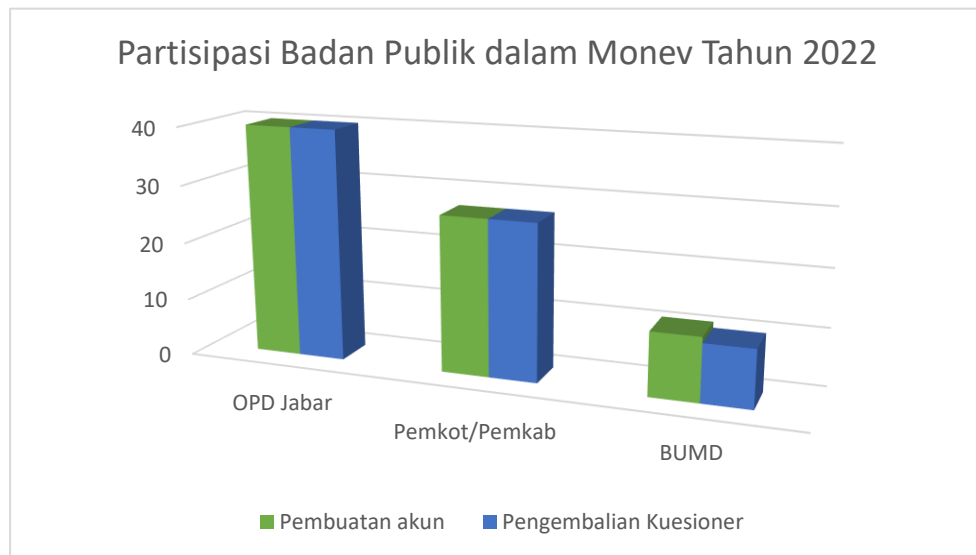
Melalui Monev, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap memperoleh gambaran berikut: Pertama, penerapan UU KIP terkait informasi penanganan *Covid-19* pada Badan Publik di Jawa Barat khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kedua, memberikan dorongan kepada Badan Publik untuk lebih transparan dan akuntabel terkait pelaksanaan penanganan *Covid-19* ini. Ketiga, memenuhi hak atas informasi masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan *Covid-19*. Keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran *Covid-19*.

Tahap pertama yang wajib dilakukan oleh Badan Publik adalah pembuatan akun E-Monev Komisi Informasi Jawa Barat agar dapat mengakses kuesioner yang termuat di dalam website E-Monev pada link <https://e-monevkijabar.com/>. Tercatat Badan Publik yang melakukan pembuatan akun dari elemen Organisasi Perangkat Daerah Jawa Barat (OPD) sebanyak 40 akun, artinya tingkat partisipasinya sebesar 100%. Untuk elemen Pemerintah Kabupaten/Kota tercatat sebanyak 27 akun, artinya tingkat partisipasinya sebesar 100% dan untuk elemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak 11 akun, artinya tingkat partisipasinya sebesar 100%.

Setelah proses pembuatan akun berhasil, langkah selanjutnya adalah mengisi kuesioner SAQ yang termuat di laman <https://e-monevkijabar.com/>, setelah Badan Publik melakukan SAQ maka Badan Publik wajib melakukan submit. sampai

pada tahap submit berakhir tercatat 40 OPD Provinsi Jawa Barat, 27 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 10 BUMD berhasil melakukan submit/mengembalikan kuesioner. Tercatat hanya 1 BUMD yang tidak melakukan submit/mengembalikan kuesioner.

Gambar 6.
Tingkat Partisipasi Badan Publik Dalam Monitoring dan Evaluasi 2022



Tim Penilai Independen Monev beserta Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan visitasi ke Badan Publik Pemerintah Kabupaten & Kota peserta Monev. Berdasarkan hasil visitasi Tim Penilai Independent dan para Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, sebagian Badan Publik belum maksimal dalam melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan informasi publik. Anggaran yang terpangkas selama masa pandemi *Covid-19* menjadi keluhan utama hampir semua PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang divisitasi. Di samping masalah anggaran yang terpangkas untuk penanganan *Covid-19*, ditemukan fakta jika masih ada PPID yang belum memahami tupoksinya dan masyarakat yang tidak paham soal SOP permintaan informasi publik.

Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa PPID telah menunjukkan keseriusan dan kualitas dalam pengelolaan dan layanan informasi publik, kendati masih dibayang-bayangi oleh pandemi *Covid-19*. Hal tersebut terlihat dari adanya inovasi

dan strategi yang telah dilakukan PPID seperti *smart city* berbasis android, pembentukan PPID sampai tingkat desa hingga tersedianya sistem data atau informasi terkait Covid-19 secara *real time*.

Sebagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat, Komisi Informasi melakukan suatu langkah baru untuk menguji fakta di lapangan bagi Badan Publik yang masuk ke dalam kategori Informatif berdasarkan hasil verifikasi SAQ dengan cara mengadakan kegiatan Uji Publik dengan mengundang koresponden yang tahu betul kondisi pelayanan informasi di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tim Penilai Independen bersama Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memutuskan bahwa hasil akhir penilaian Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 21.
Hasil Penilaian Monev KIP Jawa Barat
Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Badan Publik	Nilai E-Monev	Nilai Uji Publik/ Presentasi	Nilai Akhir
1	Pemerintah Kabupaten Bandung	100	90	92,5
2	Pemerintah Kota Cirebon	93	95	91
3	Pemerintah Kabupaten Sumedang	92	98	91
4	Pemerintah Kota Tasikmalaya	95	90,5	90,6
5	Pemerintah Kota Bekasi	91	96	90
6	Pemerintah Kota Bandung	88	86	88
7	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	84	86	86
8	Pemerintah Kota Depok	82	83	85,5
9	Pemerintah Kabupaten Kuningan	82	86	85

10	Pemerintah Kabupaten Cirebon	81	85	85
11	Pemerintah Kabupaten Bogor	82	82	85
12	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	80	86	85
13	Pemerintah Kabupaten Karawang	80	85	85
14	Pemerintah Kota Bogor	80	-	80
15	Pemerintah Kabupaten Subang	78	-	78
16	Pemerintah Kota Banjar	76	-	76
17	Pemerintah Kota Cimahi	73	-	73
18	Pemerintah Kota Sukabumi	71	-	71
19	Pemerintah Kabupaten Garut	70	-	70
20	Pemerintah Kabupaten Majalengka	65	-	65
21	Pemerintah Kabupaten Ciamis	61	-	61
22	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	57	-	57
23	Pemerintah Kabupaten Bekasi	57	-	57
24	Pemerintah Kabupaten Indramayu	49	-	49
25	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	44	-	44
26	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	37	-	37
27	Pemerintah Kabupaten Cianjur	36	-	36

Dari Rekapitulasi tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan, ada 13 (tiga belas) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akhir di angka 85 ke atas, yaitu: Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah

Kota Bekasi, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Tabel 22.
 Hasil Penilaian Monev KIP Jawa Barat
 Kategori OPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

No	Nama Badan Publik	SLIP	Berkala	Setiap Saat	Nilai	Persentase
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	110	133	107	350	100%
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	110	133	107	350	100%
3	Dinas Pendidikan	110	133	105	348	99,40%
4	Badan Pendapatan Daerah	110	118	107	335	95,70%
5	Dinas Kesehatan	110	108	107	325	92,90%
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	105	113	107	325	92,90%
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	110	106,5	107	323,5	92,40%
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	110	103	107	320	91,40%
9	Dinas Sosial	105	107,4	100	312,5	89,30%
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	110	93,5	107	310,5	88,70%
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	110	97,25	103	310,25	88,60%
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	110	93	107	310	88,60%
13	Dinas Sumber Daya Air	110	95,5	102	307,5	87,90%

14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	110	94	100	304	86,90%
15	Inspektorat Daerah	105	105,5	92	302,5	86,40%
16	Dinas Perkebunan	105	88,5	107	300,5	85,90%
17	Satuan Polisi Pamong Praja	110	105	85	300	85,70%
18	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	90,7	106,5	297,25	84,90%
19	Dinas Perhubungan	100	96,5	100	296,5	84,70%
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	97	97,5	294,5	84,10%
21	Dinas Kehutanan	105	82	107	294	84%
22	Badan Penghubung	100	95	90	285	81,40%
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	95	100	88	283	80,90%
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	110	75,5	94,5	280	80%
25	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	110	75,25	92	277,25	79,20%
26	Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat	110	94,5	70	274,5	78,40%
27	Badan Kepegawaian Daerah	95	71,5	103	269,5	77%
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	110	74,5	81	265,5	75,90%
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	105	101,5	58,5	265	75,70%
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	90	87,5	83,5	261	74,60%
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	80	70	104	254	72,60%

32	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	92	68	66	226	64,60%
33	Dinas Pemuda dan Olahraga	90	68,5	39,5	198	56,60%
34	Dinas Perumahan dan Permukiman	103	35,5	55	193,5	55,30%
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82	42	60,5	184,5	52,70%
36	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	85	62,5	30	177,5	50,70%
37	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	65	62,5	45	169,5	48,40%
38	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat	80	47	0	127	36,30%
39	Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan	70	35,25	13	118,25	33,80%
40	Dinas Lingkungan Hidup	45	22,5	27	94,5	27%

Dari Rekapitulasi tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan, ada 17 (tujuh belas) OPD Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan nilai akhir di angka 85 ke atas, yaitu : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Inspektorat Daerah, Dinas Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 23.
 Hasil Penilaian Monev KIP Jawa Barat
 Kategori BUMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

No	Badan Publik	PPID	SLIP	Berkala	Setiap Saat	Nilai	Persentase
1	PT. Jasa dan Kepariwisata (Jaswita) Jawa Barat	137,5	90,5	139	135,5	502,5	62,80%
2	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB)	50	132	195	120	497	62,10%
3	PT. Jasa Sarana	125	117	160	75	477	59,60%
4	PT. Jamkrida Jabar	65,5	103	130	89	387,5	48,40%
5	PT. Tirta Gemah Ripah	0	88	71	129	288	36%
6	PT. Agro Jabar	0	49	11	44	104	13%
7	PT. Agronesia	0	0	61	34	95	11,90%
8	PT. Migas Hulu Jabar	0	72	22	0	94	11,80%
9	PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB)	0	66	5	0	71	8,90%
10	PD. Agribisnis dan Pertambangan	0	0	0	0	0	0%

Dari Rekapitulasi tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan, ada dua BUMD yang mendapatkan nilai di atas 60 (enam puluh) yaitu: PT. Jasa dan Kepariwisata (Jaswita) Jawa Barat dengan nilai 62,80 % dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) dengan nilai 62,10 %.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bersama Tim Penilai Independen pun melakukan visitasi ke Badan Publik 10 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- **Kegiatan IKIP**

Kegiatan IKIP dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang ini mengamanatkan agar semua Badan Publik menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat sebagai pengguna informasi publik.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat turut andil dalam melaksanakan Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 dengan memilih 9 informan ahli untuk menilai indeks keterbukaan informasi publik di Jawa Barat sebagaimana ditetapkan dalam SK No 52/KI-JBR/ASE/SB/III/2022. Adapun latar belakang dari sembilan informan ahli tersebut meliputi keterwakilan badan publik, akademisi, organisasi masyarakat yang fokus terhadap isu keterbukaan informasi publik dan/atau pegiat informasi publik, pengusaha, asosiasi pengurus usaha, serta jurnalis.

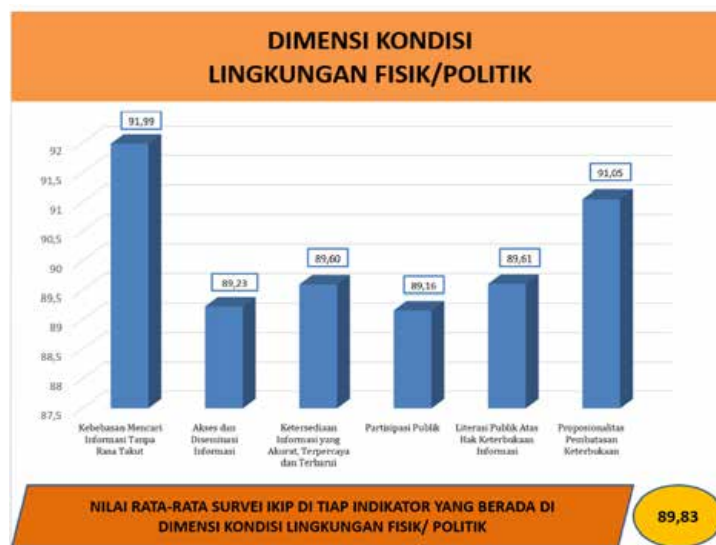
Tabel 24.
Daftar Informan Ahli

No	Nama Informan Ahli (IA)	Unsur	Profesi/Jabatan
1	Sri Lestari	Badan Publik	PPID Pemkab Bandung
2	Budi Hermawan	Badan Publik	PPID Pemkot Tasik
3	Yusuf Cahyadi Manurung	Badan Publik	PPID Pemkot Bandung
4	Dr. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si.	Masyarakat/Akad emisi	Ketua STIKOM Bandung
5	Dr. Diah Fatma Sjorida	Masyarakat/Akad emisi	Dosen FIKOM Unpad
6	Dadan Ramdan	Masyarakat/CSO	Sekjen Perkumpulan Inisiatif
7	Ali Azizi	Pelaku Usaha	Pemilik Kedai Kopi Gus
8	Erwin Kustiman	Pelaku Usaha/Media	Pemimpin Redaksi Tugubandung.id
9	Surya Batara Kartika	Praktisi Bisnis	Ketua HIPMI Jabar

Lingkungan Fisik dan Politik

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Jawa Barat untuk dimensi lingkungan fisik dan politik secara akumulasi memperoleh nilai 89,83 pasca dilakukan triangulasi dan kalibrasi. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan fisik dan politik di Jawa Barat ada dalam rentang mendekati kategori Sangat Baik.

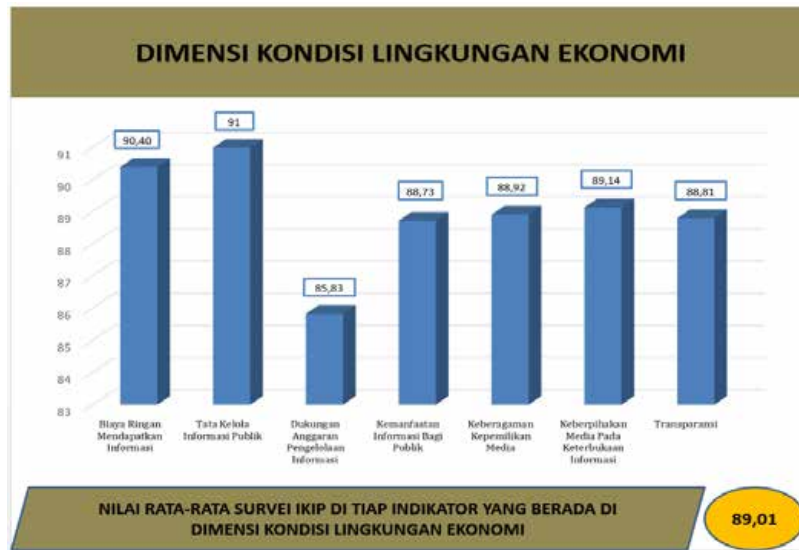
Gambar 6. Potret Dimensi Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik di Provinsi Jawa Barat Laporan IKIP 2022



Lingkungan Ekonomi

Kondisi ekonomi sangat krusial untuk memotret bagaimana akses atas informasi terbuka secara ekonomis, dan keterbukaan sebagaimana institusi-institusi yang menengahi perkara informasi secara finansial tetap dapat menjaga independensinya. Kondisi ekonomi dengan akses keterbukaan informasi akan sangat mempengaruhi dan menemntukan terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara umum dalam kondisi ekonomi di Provinsi Jawa Barat mendapatkan skor 89,01 atau Baik, sekaligus angka ini naik dari raihan IKIP 2020 sebesar 82,51 yang juga kategori baik.

Gambar 7. Potret Dimensi Kondisi Ekonomi di Provinsi Jawa Barat IKIP 2022

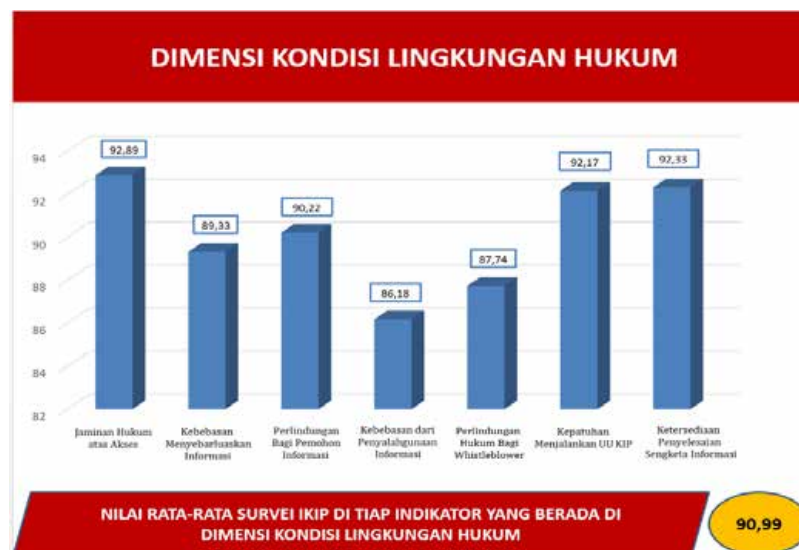


Sumber: Wawancara Informan Ahli

Lingkungan Hukum

Dalam dimensi hukum mencakup 28 pertanyaan yang terbagi dalam 7 (tujuh) indikator. Dibandingkan dua dimensi sebelumnya, dimensi hukum ini secara umum mendapatkan nilai tertinggi (90,99) berdasarkan penilaian informan ahli dalam memotret wilayah hukum yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 8. Potret Dimensi Kondisi Lingkungan Hukum di Provinsi Jawa Barat IKIP 2022



- **Kegiatan Apresiasi Desa**

Kegiatan Apresiasi Desa adalah salah satu upaya mendorong implementasi keterbukaan Informasi Publik di tingkat Pemerintahan Desa, sejak diterbitkannya Perki nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Perki ini dimaksudkan untuk memudahkan perangkat desa dalam menyediakan akses layanan Informasi Publik dan memastikan hak akses informasi masyarakat desa terpenuhi.

Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) merupakan penanggung jawab Kegiatan Apresiasi Desa yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat untuk menyeleksi 5.312 Pemerintahan Desa yang ada di Jawa Barat.

Setelah melalui beberapa tahapan dan berdasarkan hasil rapat Komisi Informasi Jawa Barat bersama DPMD Jawa Barat, maka telah terpilih 3 besar desa juara, di antaranya yaitu Desa Panjalu Kabupaten Ciamis sebagai Desa Juara Indeks Desa Mandiri (IDM), Desa Cangkingan Indramayu sebagai Desa IT, dan Desa Pilangsari sebagai Desa BUMDES.

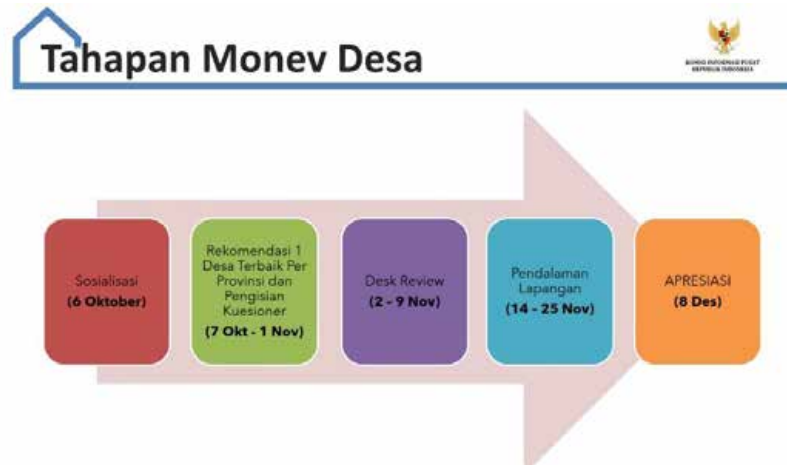
Dari ketiga desa tersebut harus dipilih Kembali satu desa terbaik yang akan menjadi perwakilan desa dari Jawa Barat untuk kembali bersaing di tahap Nasional. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Komisi Informasi Jawa Barat melakukan assessment atau penilaian langsung ke tiga desa terpilih menggunakan kuesioner sebagai instrument penilaian dengan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan berdasarkan PERKI No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Adapun, hasil dari assessment yang telah dilakukan, dibuatlah Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Usulan Dua Desa Perwakilan Jawa Barat Untuk Kegiatan Apresiasi Desa Tahun 2022

memutuskan Desa Panjalu dan Desa Cangkingan sebagai perwakilan desa dari Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Apresiasi Desa tahun 2022.

Berikut tahapan Apresiasi desa yang selanjutnya dikoordinir oleh Komisi Informasi Pusat;

Gambar 9. Potret Dimensi Kondisi Ekonomi di Provinsi Jawa Barat IKIP 2022



Setelah penetapan SK Apresiasi Desa Provinsi Jawa Barat tahun 2022, desa terpilih mengisi link kuisisioner (<https://bit.ly/KuesionerEvaluasidanApresiasiDesa-2022>) dengan melihat tata cara pengisian yang telah disediakan oleh Komisi Informasi Pusat untuk kemudian dilakukan Desk Review untuk penganugerahaan Apresiasi Desa.

- **Pencapaian Target Bidang ASE**

Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) melaksanakan 5 (lima) program kerja utama yaitu : Literasi Keterbukaan Informasi Publik, Publikasi Media TV, Media Radio, Media Cetak dan Online, Monitoring dan Evaluasi Berbasis Elektronik, Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan Apresiasi Desa.

Sampai pada bulan Desember Tahun 2022 Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) telah melaksanakan kegiatan Literasi sebanyak 17 (Tujuh belas) kali di berbagai tempat di wilayah provinsi Jawa Barat dengan mengundang

Narasumber dari berbagai unsur seperti Akademisi, Pegiat keterbukaan informasi, dll. Adapun Kegiatan Publikasi di Media TV maupun Radio sudah dilakukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.

Pada Tahun 2022 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik di wilayah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan berbasis elektronik. Gagasan ini merupakan upaya untuk mendukung program Jabar digital. Tingkat partisipasi Badan Publik dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yaitu 99% atau meningkat dibanding Tahun 2021 yaitu sebesar 67,06%. Hasil Akhir Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan terdapat 13 (tiga belas) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 17 (tujuh belas) OPD Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan nilai akhir di atas angka 85. Adapun hasil akhir monev dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menunjukkan 2 (dua) BUMD yang mendapat nilai di atas angka 60 (enam puluh).

Provinsi Jawa Barat melalui Komisi Informasi Jawa Barat melakukan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 di Jawa Barat dengan mewawancarai sembilan ahli terpilih dengan latar belakang meliputi keterwakilan badan publik, akademisi, organisasi masyarakat yang fokus terhadap isu keterbukaan informasi publik dan/atau pegiat informasi publik, pengusaha, serta jurnalis. Informan ahli menjawab tiga dimensi pertanyaan yakni lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. **Dari ketiganya, diperoleh hasil akhir nilai IKIP 2022 sebelum pembobotan sebesar 90,005 (Baik Sekali) atau naik dari raihan IKIP 2021 dengan hasil sebelum pembobotan sebesar 82,92 (Baik).**

Kegiatan Apresiasi Desa merupakan Program yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat, Pada Tahun 2022 Komisi Informasi Jawa Barat mengusulkan 2 (dua) nama desa ke Komisi Informasi Pusat yang tertuang didalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Usulan Dua Desa Perwakilan Jawa Barat Untuk Kegiatan Apresiasi Desa Tahun 2022 yaitu **Desa Panjalu** dan **Desa Cangkingan** sebagai perwakilan desa dari Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Apresiasi Desa tahun 2022.

PENUTUP |

Demikianlah Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Komisi Informasi Pusat, serta kepada seluruh rakyat Jawa Barat.

Semoga Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan kinerja Komisi Informasi Jawa Barat pada tahun berikutnya, evaluasi implementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat, dan umumnya pada siapa saja yang memerlukan.

Ketua, Wakil Ketua, para Komisioner, para Panitera, dan Tenaga Ahli, para Koordinator Assisten Ahli, Para Asisten Ahli, dan seluruh staf Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu optimalnya kinerja Komisi Informasi Jawa Barat, sekaligus mohon maaf jika masih terdapat kekurangan.

Bandung, Desember 2022

Keluarga Besar

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

- Bidang Kelembagaan
 - Penguatan Kelembagaan



Foto. Kunjungan Kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat



Foto. Kunjungan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia



Foto. Kunjungan Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat & Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah



Foto. Kunjungan Kelembagaan DPRD & Komisi Informasi Provinsi Banten



Foto. Kunjungan Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara



Foto. Kunjungan Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat



Foto. Kunjungan Kelembagaan BPKAD Provinsi Jawa Barat



Foto. Kunjungan Kelembagaan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia



Foto. Kunjungan Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat



Foto. Kunjungan Kelembagaan Ombudsman Pusat Republik Indonesia



Foto. Audiensi terkait Rakernas dengan Gubernur Jabar



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Komisi Informasi Kepulauan Riau



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke BKD Bandung



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Diskominfo Kabupaten Bogor



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke PTUN Bandung



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Diskominfo Kabupaten Garut



Foto. Penyerahan Bantuan Penanganan Bencana di Cianjur



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Komisi Informasi Kabupaten Cirebon



Foto. Audiensi ke Inspektorat Provinsi Jawa Barat



Foto. Kunjungan dan Koordinasi ke Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat di DKI Jakarta



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Diskominfo dan Komisi Informasi Kota Cirebon



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Pemerintah Kota Bekasi



Foto. Koordinasi ke Diskominfo Provinsi Jabar terkait Persiapan MONEV



Foto. Kunjungan dan Menghadiri Penghargaan ke Komisi Informasi Kalimantan Timur



Foto. Kunjungan Kelembagaan ke Komisi Informasi Kota Cirebon



Foto. Audiensi dan Penyerahan Laporan Tahunan ke Gubernur Provinsi Jawa Barat



Foto. Audiensi dan Penyerahan Laporan Tahunan ke Gubernur Provinsi Jawa Barat

- Peningkatan Kapasitas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Foto. Menghadiri undangan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Foto. Pelatihan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Solo, Jawa Tengah



Foto. Pelatihan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Solo, Jawa Tengah

- Peningkatan Kapasitas atas Permohonan Narasumber ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Foto. Menghadiri Undangan dari Kabupaten Purwakarta Menjadi narasumber tentang "standar layanan informasi publik desa"



Foto. Menghadiri undangan Narasumber di BAWASLU Kota Bandung



Foto. Menghadiri undangan Narasumber di Jaringan Radio Komunitas (JRK) Jawa Barat



Foto. Menghadiri Undangan Narasumber Diskominfo Kab Bekasi



Foto. Menghadiri undangan peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia/ RTKD 2022 di DKI Jakarta



Foto. Menghadiri Undangan Narasumber Latihan Khusus Kohati di Kabupaten Bandung



Foto. Menghadiri Undangan KAHMI Kab Bandung



Foto. Menghadiri Undangan KPU Kabupaten Bekasi



Foto. Menghadiri Undangan KPID Provinsi Jawa Barat

- Kerjasama dengan Lembaga lain



Foto. MoU Komisi Informasi Jabar dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Foto. MoU FKDM dengan Komisi Informasi Jabar



Foto. MoU Komisi Informasi Jabar dengan Universitas Islam Nusantara (UNINUS)

- Kegiatan Kelembagaan



Foto. Kegiatan Rakernis Nasional Tahun 2022 bertempat di Kota Bandung



Foto. Kegiatan Rakernis Nasional Tahun 2022 bertempat di Kota Bandung



Foto. Kegiatan Rakernis Ke-11 Hari Kedua yang bertempat di Hotel Novotel Bandung



Foto. Kegiatan Rapat Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rakernis 2022 di Kabupaten Subang



Foto. Kegiatan RAKORNAS Komisi Informasi di Kota Semarang, Prov Jawa Tengah



Foto. Kegiatan RAKORNAS Komisi Informasi di Kota Semarang, Prov Jawa Tengah



Foto. Kegiatan Hari Disabilitas Internasional bersama KI Pusat di UNPAD



Foto. Kegiatan Rapat Evaluasi Akhir Tahun dan Proyeksi Program Tahun 2023



Foto. Kegiatan Rapat Evaluasi Akhir Tahun dan Proyeksi Program Tahun 2023

- Bidang PPID



Foto. Menerima Permohonan Informasi

- Kegiatan Undangan Badan Publik



Foto. Kegiatan Pendampingan PPID Utama dalam Peningkatan Kapasitas PPID UtamaPelaksana dalam melaksanakan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Sukabumi



Foto. Menjadi Narasumber kegiatan Workshop tentang Uji Konsekuensi Daftar informasi yg dikecualikan Provinsi Jawa Barat



Foto. Menghadiri Undangan PPID Kabupaten Sumedang Sebagai Narasumber



Foto. Menghadiri Undangan PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi

- Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

- Kegiatan Persidangan Informasi Publik



Foto. Kegiatan Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Foto. Kegiatan Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Foto. Kegiatan Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Foto. Kegiatan Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dilaksanakan di Kabupaten Bekasi



Foto. Kegiatan Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dilaksanakan di Kabupaten Bekasi



Foto. Kegiatan Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dilaksanakan di Cianjur

- Kegiatan Mediasi



Foto. Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Foto. Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kabupaten Bekasi



Foto. Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE)
 - Kegiatan Apresiasi Desa



Foto. Assessment Desa Cangkringan



Foto. Assessment Desa Pilangsari

- Kegiatan IKIP Tahun 2022



Foto. FGD IKIP Bertempat di Maison Teras Kita Bandung



Foto. Rapat Laporan Final IKIP 2022 untuk ke NAC Forum



Foto. Laporan Hasil IKIP 2022 Kepada Diskominfo Jabar



Foto. Audiensi dan Penyerahan hasil IKIP KI Jabar ke KI Pusat



Foto. Penghargaan Penganugerhan Terbaik IKIP 2022 dan Launching Buku IKIP



Foto. Penghargaan Penganugerhan Terbaik IKIP 2022 dan Launching Buku IKIP

- Kegiatan Literasi



Foto. literasi bersama BKMT Jabar di Bekasi



Foto. Literasi Keterbukaan Informasi Bidang Pendidikan Kab.Purwakarta



Foto Literasi keterbukaan informasi publik di aula kantor kecamatan Cibiru kota Bandung



Foto Literasi Keterbukaan Informasi Publik di dengan tema "Transparansi Mengokohkan Peradaban Negeri" di ICMI Jawa Bara

t



Foto Literasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Indramayu

- Talkshow Radio



Foto. talkshow RRI Kota Bandung



Foto. talkshow radio elshinta kota bandung



Foto. Talkshow dengan Kompas TV di Kantor Komisi Informasi Jabar



Foto. Talkshow Keterbukaan Informasi di Radio Adil Yeli Kota Cirebon



Foto . Talkshow dengan tema Partisipasi Publik dan Pelayanan PPID di Radio eRKS Kabupaten Sumedang



Foto. Talkshow Radio Flamboyan Karawang



Foto. Talkshow Radio LPPL Cianjur 107,3 Mhz



Foto. Talkshow Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pangandaran



Foto. Talkshow Kabupaten Tasikmalaya

■ Kegiatan Webinar



Foto. Forum Group Discussion Manfaat Keterbukaan Informasi Publik Bagi Dunia Usaha via Zoom

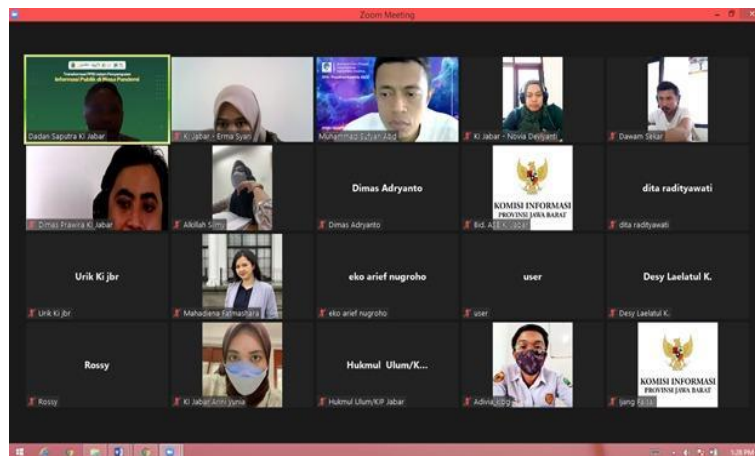


Foto. Rapat Perdana Kelompok Kerja Daerah Jawa Barat IKIP Tahun 2022 Via Zoom

- Kegiatan Sosialisasi dan Lauching Aplikasi E-Monev kepada Badan Publik



Foto. Sosialisasi E-Monev di Ruang Papandayan



Foto. Sosialisasi E-Monev di Ruang Papandayan



Foto. Sosialisasi E-Monev di Ruang Papandayan

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Penerapan Keterbukaan Informasi oleh Badan Publik



Foto. Visitasi Penilaian Monev ke Kota Cirebon



Foto. Visitasi Penilaian Monev ke Kota Bekasi



Foto. Visitasi Penilaian Monev ke Kota Tasik



Foto. Visitasi Penilaian Monev ke Kabupaten Bandung



Foto. Uji Publik Kabupaten Bandung



Foto. Uji Publik Kota Bekasi



Foto. Uji Publik Kota Cirebon



Foto. Uji Publik Kota Tasikmalaya



Foto Presentasi 7 Badan Publik



Foto. Presentasi Badan Publik Kabupaten Pangandaran



Foto. Presentasi Badan Publik Karawang



Foto. Presentasi Badan Publik Kota Purwakarta dan Kab.Bogor

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 4

TAHUN : 2022

TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) KOMISI INFORMASI JAWA BARAT TAHUN 2022

No	Nama Informasi	Pejabat yang Menguasai	Penanggungjawab/ Pembuat/Penerbit	Waktu & Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Status Informasi			Yang Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
						Wajib Disediakan Setiap Saat	Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta		
1	Profil Komisi Informasi Jabar	Atasan PPID	Kelembagaan	Jan'2021	Soft Copy	V				4 tahun
2	Agenda Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	Atasan PPID	Kelembagaan	Jan'2021	Hard Copy Soft Copy	V				1 Bulan
3	SK PPID KI Jabar	Atasan PPID	Kelembagaan	Jan'2021	Hard Copy Soft Copy	V				
4	Struktur PPID KI Jabar	Atasan PPID	PPID	Jan'2021	Hard Copy Soft Copy	V				
5	SOP PPID KI Jabar	Atasan PPID	PPID	Jan'2021	Hard Copy Soft Copy	V				
6	Rekapitulasi Pemohonan PSI Per Catur Wulan 2022	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2022	Hard Copy Soft Copy	V				1 Bulan
7	Rekapitulasi Pemohonan PSI Per Tahun 2017	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2018	Hard Copy Soft Copy	V				

8	Rekapitulasi Pemohonan PSI Per Tahun 2018	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2019	Hard Copy Soft Copy	V			
9	Rekapitulasi Pemohonan PSI Per Tahun 2019	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2020	Hard Copy Soft Copy	V			
10	Rekapitulasi Pemohonan PSI Per Tahun 2020	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2021	Hard Copy Soft Copy	V			
11	Rekapitulasi Pemohonan PSI Per Tahun 2021	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2022	Hard Copy Soft Copy	V			
12	Jadwal sidang & mediasi sengketa tahun 2017	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2018	Hard Copy Soft Copy	V			
13	Jadwal sidang & mediasi sengketa tahun 2018	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2019	Hard Copy Soft Copy	V			
14	Jadwal sidang & mediasi sengketa tahun 2019	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2020	Hard Copy Soft Copy	V			
15	Jadwal sidang & mediasi sengketa tahun 2020	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2021	Hard Copy Soft Copy	V			
16	Jadwal sidang & mediasi sengketa tahun 2021	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2022	Hard Copy Soft Copy	V			
17	Surat penetapan Majelis	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2018	Hard Copy Soft Copy	V			

24	Rekap Kegiatan PSI & Persidangan tahun 2018	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2019	Hard Copy Soft Copy	V				
25	Rekap Kegiatan PSI & Persidangan tahun 2019	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2020	Hard Copy Soft Copy	V				
26	Rekap Kegiatan PSI & Persidangan tahun 2020	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2021	Hard Copy Soft Copy	V				
27	Rekap Kegiatan PSI & Persidangan tahun 2021	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2022	Hard Copy Soft Copy	V				
28	Rekap kegiatan PSI & Persidangan tahun 2022	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2022	Hard Copy Soft Copy	V				1 Bulan
29	Salinan Putusan Sengketa Informasi, Mencakup Putusan Sela, Mediasi & Ajudikasi tahun 2017	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2018	Hard Copy Soft Copy	V				
30	Salinan Putusan Sengketa Informasi, Mencakup	Atasan PPID	Bidang PSI	Jan'2019	Hard Copy Soft Copy	V				

43	Sosialisasi KI Jabar 2019	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2021	Hard Copy Soft Copy	V	1 Bulan
44	Jadwal Kegiatan Sosialisasi KI Jabar 2020	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2021	Hard Copy Soft Copy	V	1 Bulan
45	Laporan Kegiatan Talkshow Keterbukaan Informasi Publik di Media Massa Tahun 2017	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2018	Hard Copy Soft Copy	V	
46	Laporan Kegiatan Talkshow Keterbukaan Informasi Publik di Media Massa Tahun 2018	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2019	Hard Copy Soft Copy	V	
47	Laporan Kegiatan Talkshow Keterbukaan Informasi Publik di Media Massa Tahun 2019	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2020	Hard Copy Soft Copy	V	
48	Laporan Kegiatan Talkshow Keterbukaan Informasi	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2021	Hard Copy Soft Copy	V	

54	Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik 2020	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2021	Hard Copy Soft Copy	V			
	Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik 2021	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2022	Hard Copy Soft Copy	V			
55	Laporan Diskusi Keterbukaan Informasi Publik dan Silaturahmi antar <i>Stakeholder</i> di Menara Gedung Sate Bandung	Atasan PPID	Bidang ASE	2018	Hard Copy Soft Copy	V			
56	Laporan Kegiatan Seminar Keterbukaan Informasi Publik bersama masyarakat Cianjur di Aula BAPPEDA Kab. Cianjur Tahun 2020	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2021	Hard Copy Soft Copy	V			

57	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2017	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2018	Hard Copy Soft Copy	V				
58	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2018	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2019	Hard Copy Soft Copy	V				
59	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2020	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2020	Hard Copy Soft Copy	V				
	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2020	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2021	Hard Copy Soft Copy	V				
60	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Badan Publik	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2022	Hard Copy Soft Copy	V				

61	Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Tim Independen Monitoring & Evaluasi Penerapan UU KIP 2017	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2018	Hard Copy Soft Copy	V			
62	Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Tim Independen Monitoring & Evaluasi Penerapan UU KIP 2018	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2019	Hard Copy Soft Copy	V			
63	Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Tim Independen Monitoring & Evaluasi	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2020	Hard Copy Soft Copy	V			

63	Penerapan UU KIP 2019 Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Tim Independen Monitoring & Evaluasi Penerapan UU KIP 2020	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2021	Hard Copy Soft Copy	V				
64	Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Tim Independen Monitoring & Evaluasi Penerapan UU KIP 2021	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2012	Hard Copy Soft Copy	V				
65	Berita Acara Hasil Akhir Penilaian MONEV 2017	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2018	Hard Copy Soft Copy	V				
66	Berita Acara Hasil Akhir Penilaian MONEV 2018	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2019	Hard Copy Soft Copy	V				
67	Berita Acara Hasil Akhir	Atasan PPID	Bidang ASE	Jan'2020	Hard Copy Soft Copy	V				

Menyetujui,
Komisioner Bidang Asistensi dan PPID
Selaku Atasan PPID
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,



Yudaningsih

Menetapkan,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,



Nandi Sobandiana, S.H.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, 



Ijang Faisal